

**PEMBUNUHAN KHALIFAH UTSMAN BIN AFFAN
SEBAGAI ANARKISME POLITIK
(Kajian atas Fenomena *Post-truth* dalam
Kekerasan Politik di Awal Sejarah Islam)**

Ach. Maimun

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA)

Email: mymoon221@gmail.com

Abstrak

Anarkisme politik kubu oposisi yang menyebabkan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan adalah peristiwa politik kelam dalam sejarah umat Islam awal umat Islam dengan rentetan dampak serius di masa berikutnya. Kajian ini memfokuskan pada aspek-aspek *Post-Truth* yang ada dalam peristiwa tersebut serta bagaimana ia bekerja menggerakkan kubu oposisi untuk tidak lagi peduli dengan informasi yang objektif. Kajian ini menggunakan teori *Post-Truth* dengan melacak data dari sumber-sumber otoritatif sejarah Islam untuk mengungkap fakta-fakta sebenarnya yang banyak dibahas para ahli sejarah. Ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa tuduhan nepotis dan korup kepada Khalifah Utsman hoaks. Selanjutnya dilakukan identifikasi aspek-aspek *Post-Truth* yang terdapat dalam rangkaian peristiwa ini. Dari kajian ini dapat disimpulkan aspek-aspek *Post-Truth* dalam anarkisme politik atas kekuasaan Khalifah Utsman terbagi menjadi tiga: (1) pengabaian terhadap fakta dalam penggantian gubernur dengan anggota keluarganya, melindungi anggota keluarga yang bersalah, tuduhan korupsi pada dalam penjualan ghanimah dari penaklukan kawasan Afrika Utara serta hadiah yang diberikan anggota keluarga; (2) penafian realitas secara lebih luas dalam konteks nepotisme dalam konteks negara monarkhis dan tidak adanya penolakan di beberapa daerah yang pejabatnya adalah keluarga Utsman, pejabat yang diangkat memenuhi syarat, (3) Lenyapnya moralitas publik yang munculkan gerakan anarkis dengan tindakan intoleran sehingga menyebabkan terbunuhnya khalifah Utsman.

Kata kunci: *Post-Truth*, Politik Islam, Khalifah Usman, Anarkisme Politik

Abstrack

The political anarchy of the opposition that led to the assassination of the Caliph Uthman bin Affan is a dark political event in the history of early Muslims, with a number of serious repercussions in the following periods. This study focuses on the aspects of post-truth that were present in the event and how it worked to move the opposition group to no longer care about objective information. The study applies the post-truth theory by tracing data from authoritative sources of Islamic history to uncover the true facts discussed by historians. It aims to confirm that the allegations of nepotism and corruption against the Caliph Uthman were a hoax. It also identified the post-truth aspects of this series of events. From this study, it can be concluded that the aspects of post-truth in the political anarchism surrounding Caliph Uthman's power can be divided into three: (1) Ignoring the facts in the replacement of governors with members of his family, the protection of guilty family members, accusations of corruption in the sale of ghanimah from the conquest of North Africa and gifts given by family members; (2) The denial of reality in the broader context of nepotism, in the context of a monarchical state and the absence of rejection in several regions whose officials were Uthman's family, the appointed officials were qualified, (3) The disappearance of public morality that emerged an anarchist movement with intolerant actions that led to the assassination of the Caliph Uthman.

Keywords: Post-Truth, Political Islam, The Caliph Uthman, Political Anarchism

Pendahuluan

Sayyidina Utsman bin Affan r.a. wafat—setelah pengepungan dan negosiasi yang alot selama beberapa hari—di tangan Al-Ghafiki bin Harb al-Akki (pemimpin demonstran Mesir) yang pertama kali memukul kepalanya hingga terluka, lalu Saudan bin Hamran menebas lehernya yang juga menyebabkan jari-jari Nailah binti al-Furafidah (istri Utsman) terputus karena berusaha melindunginya.¹ Bersama itu, budak lelakinya yang melabrak masuk juga dibunuh oleh Qutaibah al-Sukkuni. Utsman meninggal saat membaca al-Qur'an pada malam Jumat 8 Dzul Hijjah 35 H/456 M dalam usia 82 tahun.

Setidaknya ada tiga alasan yang menjadikan peristiwa pembunuhan (Sayyidina) Utsman bin Affan penting dalam sejarah Islam. *Pertama*, ia merupakan pembunuhan pertama terhadap pemimpin tertinggi Islam yang sah oleh umat Islam sendiri dalam sebuah gerakan demonstrasi. Tragedi itu bukan sekadar peristiwa yang melibatkan kasus perorangan (seperti kasus pembunuhan Umar bin Khattab, karena dendam pribadi seorang budak dari penaklukan meliter Persia), melainkan suatu gerakan politik yang dalam tingkat tertentu bisa disebut terorganisir dari sebuah kekuatan oposisi yang berujung tindakan anarkis.²

Kedua, tragedi ini memberikan dampak serius dalam sejarah Islam berikutnya, seperti persoalan balas dendam, perang saudara dan persaingan politik antar suku. Yang bisa dilihat sebagai peristiwa yang terkait langsung dengan tragedi ini antara lain: Perang Jamal, Perang Siffin, yang kemudian melahirkan pembunuhan terencana atas Ali bin Abi Thalib, tragedi Karbala, pembunuhan Abdullah bin Zubair oleh Hajjaj, serta kemunculan Syi'ah dan Khawarij.³ Itu belum termasuk dampak psikologisnya dalam kehidupan masyarakat Islam.

Ketiga, peristiwa anarkis dan pembunuhan sangat brutal ini terjadi di masa sahabat yang dinilai sebagai generasi terbaik dalam keseluruhan sejarah umat Islam.⁴ Pada saat itu, hampir semua murid terbaik Nabi Muhammad masih hidup karena terjadi hanya 25 tahun setelah ditinggal Nabi Muhammad saw. Bukan semata munculnya oposisi sebagai bentuk konflik antar umat Islam sepeninggal Nabi Muhammad, tapi juga gerakan massa dalam bentuk kekerasan

¹Ada yang mengatakan pembunuhnya Kinanah bin Bisyr bin Attab al-Tujibi dan Sawdan bin Hamran. Selain itu ada perbedaan pendapat tentang umur Utsman. Lihat Ibn al-Atsir, *Al-Kamil fi al-Tarikh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1965), III: 175. Lihat juga al-Thabary, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk* (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), V: 122-3.

²Istilah "oposisi" ini digunakan oleh M.A. Shaban dan W. Madelung untuk menunjuk gerakan menentang kekhalifahan Utsman karena berbagai kebijakan dan berbagai tuduhan negatif. Sementara al-Thabari menyebut kelompok *al-munharifun* (pembelot).

³Syed Mahmudannasir, *Islam, Its Concept and History*, cet. ke-3 (New Delhi: Kitab Bhavan, 1994), 143.

⁴Ulama menetapkannya berdasar salah satu hadits Nabi swa bahwa sebaik-baiknya adalah yang hidup pada zamankau, kemudian yang setelahnya dan seterusnya (H.R Bukhari No. 2458).

yang menimbulkan korban jiwa antar sesama muslim. Bukan hanya itu, peristiwa tersebut menjadi semakin tragis karena kapasitas Utsman sebagai korban dan pihak yang tertuduh adalah pemimpin yang sah dan tertinggi umat Islam, orang ketiga terbaik dari semua sahabat Nabi Muhammad saw,⁵ bahkan menantu Nabi Muhammad saw. Bahkan semakin ironis, karena Utsman dipenggal saat ia membaca Alquran. Tragedi ini juga berdampak pada pergeseran ide kesucian pribadi khalifah yang dianggap suci (*sacred*) dan tidak bisa diganggu gugat (*inviolable*) serta hanya bertanggung jawab secara vertikal. Ia bergeser pada keharusan mempertanggungjawabkan perbuatannya pada rakyat, dan rakyat bisa menurukannya jika tidak bisa memenuhi tugasnya. Ini menegaskan pernyataan para khalifah sendiri menyatakan bahwa mereka terbuka terhadap kritik, meminta ditegur jika salah. Pernyataan ini seperti yang dinyatakan langsung dalam pidato pertama Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khatthab.

Yang menonjol sebagai faktor munculnya gerakan politik anarkis dari kelompok oposisi adalah tersebarnya berita tentang nepotisme dan korupsi dalam kekhalifahan Utsman bin Affan. Faktor ini yang penting dilihat lebih jauh karena kompleksitas peristiwa historis itu sendiri. Kebanyakan ahli Sejarah tidak membenarkan tuduhan tersebut, atau sebagiannya menegaskan kesalahpahaman atas berbagai penilaian atas kebijakan sang Khalifah. Beberapa yang membenarkan tuduhan itu dinilai sebagai interpretasi yang salah atas fakta historis. Karena sejarah bukan sematar deretan data-data peristiwa masa lampau, tapi ia juga menyangkut interpretasi ahli sejarah atas berbagai peristiwa.⁶

Berbagai kajian tentang sejarah politik Islam lebih banyak melihat pada aspek perpecahan dan dampak politik serta berbagai faktor yang melatari. Yang nyaris tidak diulas adalah tetap Bergeraknya berbagai elemen masyarakat dengan berbekal informasi yang tersebar berupa tuduhan nepotisme dan korupsi tanpa mengindahkan penjelasan dari pihak terkait atau tanpa berupaya mencari informasi yang valid tentang tuduhan tersebut. Orang-orang tetap bergerak dan tidak mau tahu lagi tentang kebenaran tuduhan tersebut. Padahal sudah ada klarifikasi dari kubu khalifah terkait dengan berbagai tuduhan kepada dirinya, bahkan oleh Khalifah Utsman sendiri.⁷ Sebagian menegaskan pengaruh Abdullah bin Saba' yang

⁵Para ulama umumnya menyatakan bahwa urutan orang termulia dari kalangan umat Nabi Muhammad saw adalah Abu Bakar, Umar, lalu Utsman. Jalaluddin al-Suyuthi, *Itmam al-Dirayah li Qurra' al-Nuqayah*, (Kairo: Kasyidah, 2019), 67.

⁶Nourouzzaman Shiddiqy, *Menguak Sejarah Muslim: Suatu Kritik Metodologis* (Yogyakarta: PLPM, 1984), 1.

⁷J. Soe'yb, *Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 438.

memprovokasi masyarakat Islam di berbagai daerah, walaupun sebagian lagi membantahnya sebagai faktor determinan dan sebatas faktor penyerta.

Terlepas dari siapa aktor yang memobilisasi, rupanya muncul fenomena menangnya persepsi negatif, hoaks dan pengabaian kepada kebenaran yang merupakan unsur-unsur utama yang sekarang disebut *Post-Truth*. Rupanya, fenomena ini sudah terlihat aspek-aspeknya pada masa tersebut sekalipun mungkin belum merupakan fenomena global seperti saat ini. Di sini yang menjadi focus adalah keberadaan aspek-aspek dari fenomena *Post-Truth* dan bagaimana ia bekerja sehingga melahirkan anarkisme politik di awal Sejarah Islam. Mungkin belum terbayangkan jika aspek-aspek dari *Post-Truth* dapat muncul di masa lalu. Karena ia adalah fenomena baru yang dikenal sejak masifnya media sosial dan maraknya *hoax* di dalamnya, khususnya menjadi populer di 2016 melalui fenomena Trump dan Brexit.

Post-Truth dipahami sebagai kondisi di mana fakta objektif diabaikan dengan hanya berpedoman pada persepsi yang dilanjutkan dengan pengelolaan emosi untuk membangun opini sesuai kepentingan.⁸ Secara filosofis ia membangun landasannya pada relativitas kebenaran, bahkan nihilisme dan skeptisisme atas kebenaran. Kebenaran adalah sesuatu yang dikonstruksi menurut persepsi masing-masing, tidak ada kebenaran objektif dan moral universal.⁹ Dengan demikian, *Post-Truth* memiliki karakteristik: (1) tidak memerdulikan perbedaan antara opini dan berita, fakta dan hoaks, fiksi dan realitas, (2) lenyapnya moral publik dan perilaku publik dikendalikan oleh kebencian dan intoleransi, (3) melawan ketulusan, saling curiga yang kemudian meningkatkan iklim ketidakpercayaan timbal balik dan menguatkan potensi terjadinya kekerasan antar individu hingga kolektif.¹⁰ Semua berpangkal dari persepsi dan keyakinan yang rancu hingga berakhir pada kekerasan. Dalam masyarakat Islam awal yang disebut sebagai komunitas terbaik, hoaks dan persepsi subjektif dapat digunakan untuk mengaduk emosi dan akhirnya melahirkan perilaku anarkis, radikal dan intoleran.

⁸Zainul Adzfar dan Badrul Munir Chair, "Kebenaran di Era Post-Truth dan Dampaknya bagi Keilmuan Akidah," *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Volume 9, Nomor 2, 2021: 167.

⁹Cosmas Eko Suharyanto, "Analisis Berita Hoaks di Era Post-Truth: Sebuah Review," *Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi* 10, no. 2 (Desember 2019): 38.

¹⁰John Christianto Simon, "Pendidikan Kristiani di Era Post-Truth: Sebuah Perenungan Hermeneutis Paul Ricoeur," *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 5, no. 1 (September 30, 2020): 101.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, karena bertumpu kepada data-data pustaka atau sumber berupa buku dan artikel. Data-data yang dilacak adalah data tentang tuduhan utama kelompok oposisi berupa nepotisme dan korupsi. Karena dua tuduhan ini yang menjadi alasan gerakan oposisi melakukan demonstrasi hingga anarki yang mengakibatkan pembunuhan sadis terhadap sang khalifah. Tuduhan yang menjadi dasar ini dicari kebenarannya dalam berbagai literatur sejarah otoritatif yang biasa dijadikan rujukan para sejarawan Islam. Data-data dihimpun untuk memastikan kebenaran tuduhan tersebut dan menampilkan apa yang sebenarnya terjadi serta bentuk.

Kajian dilakukan secara intertekstual dengan memperbandingkan data-data yang ada di berbagai buku tarikh yang dinilai otoritatif. Jika terjadi kesamaan, data diambil dari salah satu sumber. Jika ada perbedaan tapi hanya bersifat rincian, diambil salah satunya dan rinciannya ditambahkan. Jika terjadi perbedaan yang bertentangan, dicarikan pelacakan silang ke sumber lain, termasuk kepada sumber-sumber baru dari penulis non-Arab, baik Indonesia atau Barat. Data-data yang diperoleh disusun secara sistematis mengikuti alur uraian. Data-data yang diperoleh dan disistematisasi selanjutnya dianalisis menggunakan teori *Post-Truth* untuk menunjukkan aspek-aspeknya yang ditemukan dalam rangkaian peristiwa historis, bagaimana fenomena itu muncul dan bekerja sehingga melahirkan anarkisme politik dalam sejarah Islam awal.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

***Hoax* sebagai Faktor Determinan**

Dalam kebanyakan literatur sejarah dikatakan bahwa munculnya gerakan oposisi terhadap pemerintahan Utsman karena beberapa faktor. *Pertama*, nepotisme. Yang paling tampak adalah penggantian gubernur-gubernur dengan keluarga dekat, seperti Amr bin Ash (Mesir) dengan Abdulah bin Amr bin Abi Sarh (saudara susuan [25/645]), Sa'ad bin Abi Waqqas (Kufah) dengan Walid bin Uqbah (saudara seibu [25/645]), Abu Musa al-Asy'ari (Bashrah) dengan Abdullah bin Amir (saudara sepupu 29/694), sedang Mu'awiyah bin Abi Sufyan (Syam) yang masih kerabatnya sendiri (Affan sepupu dengan Abu Sufyan) tidak diganti.¹¹ Ditambah lagi dengan penggantinya Zaid bin Tsabit (kepala al-Dawawin/sekretariat

¹¹Wilfred Madelung, *The Succession to Muhammad* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 87. Kemudian karena tuduhan pelanggaran, Walid diganti Sa'd bin Amir (juga anggota keluarga Bani Umayyah) tahun 30/650.

negara) dengan Marwan bin Hakam (sepupu Utsman). Rata-rata pergantian gubernur itu dilakukan setelah satu tahun pemerintahannya.

Kedua, penyalahgunaan kekayaan negara untuk kepentingan keluarga. Antara lain: (1) penjualan *al-khumus* dari Afrika Utara (Tripoli) kepada Marwan hanya dengan harga 500.000 dinar, harga yang sama sekali tidak layak, (2) pemberian uang sebesar 300.000 dirham kepada Hakam bin Ash.¹² Mungkin juga terkait dengan pemberian pelbagai fasilitas kepada keluarga. Tuduhan korupsi itu diperkuat dengan gaya hidup para gubernur yang cenderung bermewah-mewahan.

Selain itu, Utsman juga dianggap terlalu melindungi keluarganya dari jerat hukum yang berlaku. Salah satu kasus yang mencolok saat ia tidak mau menyerahkan Marwan untuk diadili kaum demonstran karena telah membuat surat perintah palsu kepada Gubernur Mesir untuk menangkap dan menghukum semua yang terlibat dalam gerakan oposisi. Apalagi yang tampak bahwa pemerintahan dikendalikan Marwan yang cenderung mementingkan keluarga dan sikap hidup mewah mereka yang menimbulkan kecemburuan sosial.¹³

Persoalan nepotisme dalam konteks ini menunjuk pada pengertian kebijakan politik berupa pengangkatan keluarga atau kerabat pada berbagai posisi strategis. Dalam hal sebagai faktor munculnya gerakan oposisi—yang menilainya sebagai suatu yang negatif sehingga Utsman digugat dan dituntut untuk *lengser*—ada beberapa hal yang perlu dilihat kembali. *Pertama*, Utsman telah mengganti gubernur-gubernur—sekalipun keluarganya sendiri—sesuai tuntutan rakyat. Walid dihukum di muka umum dan dipecat dengan tidak hormat atas tuduhan mabuk-mabukan, sebagaimana laporan rakyat Kufah, dan menggantinya dengan Sa'id bin Ash, yang kemudian diganti lagi dengan Abu Musa al-Asy'ari sebagaimana tuntutan mereka.¹⁴ Tapi ternyata mereka masih melakukan gerakan pembangkangan. Sebelumnya Utsman memecat Abu Musa al-Asy'ari sebagai Gubernur Bashrah sesuai dengan tuntutan rakyat Bashrah dan menggantinya dengan Abdullah bin Amir. Saat itu tidak ada protes rakyat Bashrah dengan alasan nepotis.¹⁵

Kedua, daerah-daerah yang bergolak adalah Mesir, Kufah dan Bashrah, sementara daerah lain seperti Syam, Mekkah dan ibu kota Madinah dan daerah lainnya tetap aman, tanpa

¹²Joesoeb Soe'yb, *Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 436-7.

¹³Tim Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), V: 142.

¹⁴Muhammad Khudari Bek, *Muhammad Tarikh al-Umam al-Islamiyyah* (Kairo: Maktabah Tijariyah al-Kubra, 1969), I: 33-4.

¹⁵J. Soe'yb, *Sejarah Daulat*, 425.

ada gerakan apa-apa. Menarik juga diteliti, mengapa di ketiga daerah tersebut—khususnya tidak muncul gerakan serupa. Semestinya Madinah sebagai ibu kota memberikan reaksi pertama, karena dari sana kebijakan bersumber dan dari sana pula kebijakan akan berubah. Di Syam (meliputi Syiria, Palestina dan sekitarnya) tidak ada gerakan apa-apa, padahal Gubernurnya (Mu'awiyah bin Abu Sufyan) adalah juga kerabat Utsman. Ternyata tidak ada persoalan nepotisme.

Ketiga, sistem pemerintahan yang umum pada saat itu adalah sistem monarki (kerajaan), bahkan monarki absolut seperti Romawi, Persia dan Abesenia. Sistem yang monarkis, nepotisme tak terhindarkan, bahkan korup dan otoriter. Tapi tidak muncul oposisi atas alasan itu. Bahkan rakyat bisa tidak mempersoalkannya, jika mereka merasa hidup sejahtera. Ketidaksukaan rakyat akan muncul, jika pemerintah sewenang-wenang yang mengakibatkan kehidupan melarat dan pemberontakan itu karena perebutan kekuasaan antar pewarisnya. Maka nepotisme pada saat itu bukan masalah prinsip dalam ketatanegaraan, justru ia adalah kelaziman dalam sistem monarki absolut. Bukankah dinasti sesudahnya (Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah dan lainnya) adalah monarkis dan nepotis?

Keempat, nepotisme memang terjadi jika pengertiannya seperti di atas. Tapi ia akan menjadi negatif pada konteks Arab masa itu jika penguasanya bertindak lalim. Sementara belum ada bukti sejarah kesewenang-wenangannya. Kecuali pola hidup para penguasa yang cenderung mewah sehingga menimbulkan kecemburuan sosial,¹⁶ mereka adalah penguasa yang memenuhi kualifikasi dan kapabilitas.

Dengan realitas tersebut di atas, nepotisme menjadi sulit diterima untuk menjadi faktor utama yang melatari munculnya gerakan oposisi. Ia lebih cenderung sebagai isu utama yang sengaja ditonjolkan sebagai bahasa pemersatu gerakan. Ia lebih tampak sebagai hal—yang sebenarnya bukan masalah—yang sengaja direkayasa untuk menjadi persoalan dengan memanfaatkan rakyat yang resah dan kecewa.

Pengangkatan anggota keluarga sebagai gubernur di berbagai daerah, tampaknya bukan semata-mata kepentingan keluarga, apalagi atas rekayasa Marwan. Karena belum ada bukti yang jelas, kecuali sekedar kecurigaan sejarawan melihat peran dominan Marwan dalam pemerintahan. Terlepas dari benar dan tidak, ia juga memiliki pertimbangan logis. *Pertama*, seluruh gubernur adalah orang-orang yang memiliki kecakapan khususnya dalam bidang militer. Mu'awiyah adalah orang pertama dalam Islam yang membangun angkatan laut untuk

¹⁶Asghar Ali Engineer, *The Origin and Development of Islam* (New Delhi: Orient Logman, 1980), 166.

mengimbangi bahkan mengalahkan armada Romawi di Lycia lalu membebaskan Cyprus dan Rhodes. Mu'awiyah juga membebaskan daratan Armenea. Abdullah bin Amr bin Abi Sarah adalah tangan kanan Amr bin al-Ash dalam berbagai ekspedisi dan ekspansi. Ia mampu mengalahkan pasukan tangguh Gregorius, membebaskan Aleksandria dari Byzantium. Abdullah bin Amir adalah panglima Islam yang berjasa melepas seluruh kekuasaan Yazdigird III (Khusru Sasanian) Persia serta berjasa dalam berbagai pertempuran di Khurasan dan sekitarnya. Walid bin Uqbah adalah tokoh dalam penguasaan Armenea dan Azerbaijan.¹⁷

Dalam tradisi pengangkatan gubernur di wilayah baru zaman itu, orang yang diangkat adalah panglima perang yang berjasa menaklukkannya, seperti Amr bin al-Ash sebagai penakluk Mesir dan kemudian menjadi gubernur di sana. Dalam regenerasi setelah gubernur lama memasuki usia senja, tentu saja para asisten panglima yang naik pangkat menjadi panglima ketika sang panglima menjadi gubernur. Ketika Amr bin al-Ash memasuki usia pensiun, tentu panglimanya yang menggantikannya menjadi gubernur. Demikian juga di kawasan lain. Terlepas dari unsur nepotisme, mereka telah sampai dalam jenjang kepangkatan dalam perjalanan kariernya.

Kedua, memilih kerabat sendiri merupakan sesuatu yang lazim, yang dimaksudkan untuk menguatkan posisi dan kontrol serta memperlancar roda pemerintahan. Karena yang diperlukan adalah orang yang di samping memiliki kapabilitas, juga diperlukan orang-orang yang memiliki loyalitas tinggi.¹⁸ Bagi bangsa Arab, yang pasti loyal adalah anggota keluarganya sendiri. Hal itu menjadi pertimbangan karena loyalitas para tokoh di daerah sudah mulai menipis karena terbentur dengan berbagai kepentingan pribadi, khususnya setelah melihat kekayaan melimpah dari daerah baru yang ditaklukkan. Terkikisnya loyalitas itu dapat dipahami dari dasar dua tipe pejuang yang memang ada dalam penjuang Islam: *muhtasib* (yang ikhlas karena Allah) dan *thami'* (yang berjuang karena harta rampasan perang).¹⁹ Pada konteks loyalitas, watak dasar Arab adalah semangat *'ashabiyyah*-nya yang tidak mudah mengakui kekuasaan di luar sukunya.²⁰ Ketika Islam sudah mencapai wilayah yang sangat luas dan memperoleh kekayaan melimpah, sangat sulit membedakan orang-orang yang loyal sepenuh

¹⁷Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam* (Kairo: Maktabah al-Nahdliyyah al-Mishriyyah, 1964), I: 258-9. Bandingkan dengan N. Shiddiqy, *Menguak Sejarah*, 79-81.

¹⁸M.A. Shaban, *Islamic History, A New Interpretation* (Cambridge: Cambridge University Press, 1971), I: 66.

¹⁹A. A. Engineer, *The Origin and*, 153.

²⁰N. Shiddiqy, *Menguak Sejarah*, 68.

hati atau tidak, antara *muhtasib* dan *thami'*. Kurangnya loyalitas itu dapat dilihat pada Gubernur Mesir, Amr bin al-Ash, yang cenderung *independen-minded*.²¹

Untuk lebih berhati-hati, pengangkatan anggota keluarga menjadi pilihan paling rasional. Salah satu contohnya adalah Ammar bin Yasir yang dikenal sebagai tokoh senior dan berpengaruh. Saat diutus ke Mesir untuk meneliti kasus kerusuhan, justru bergabung dengan kelompok oposisi dan Muhammad bin Abi Bakar yang terprofokasi nyaris terlibat dalam pembunuhan Utsman.²²

Dalam masalah tuduhan korupsi, ternyata sulit diterima, kalau saja melihat lebih jauh pola kehidupan Utsman sejak baru masuk Islam.²³ Bahkan sampai akhir kekhalifahannya, Utsman yang saudagar kaya itu hanya menyisakan kekayaan berupa dua ekor unta kendaraan di akhir masa jabatannya.²⁴ Tentang penggunaan kekayaan negara untuk kepentingan keluarga, juga sulit diterima ketika melihat kepribadiannya yang sangat hati-hati terhadap hal-hal yang bukan haknya.

Menurut al-Thabary, tuduhan penyelewengan kekayaan negara itu sama sekali tidak benar. Penjualan *al-khumus* dari Afrika Utara pada Marwan dengan harga di bawah standar (500.000 dirham) tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya. Yang terjadi adalah penjualan sebagian *al-khumus* yang berupa kuda, kambing dan sejenisnya karena sulit dibawa ke Madinah dan mungkin akan menelan *cost* yang lebih besar. Karena itu dijual pada Marwan dengan harga 100.000 dirham dan langsung diserahkan ke Baitul Mal. Sementara sisa *al-khumus* yang berupa barang-barang berharga seperti emas, perak dan sejenisnya diserahkan ke baitul mal.²⁵

Pemberian uang sebesar 300.000 dirham kepada Abdullah bin Khalid merupakan hutang dari Baitul Mal dan terbukti beberapa waktu sesudahnya dilunasi. Demikian juga pemberian uang kepada al-Hakam bin Ash sebesar 100.000 dirham. Itu sebenarnya merupakan pemberian pribadi pada saat perkawinan putra Utsman dan putrinya. Utsman juga pernah memberikan bantuan pribadi sebesar 100.000 dirham saat perkawinan putrinya dengan putra Marwan.²⁶

²¹M.A. Shaban, *Islamic History*, 66.

²²J. Soe'yb, *Sejarah Daulat*, 15.

²³Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam*, I: 263-5. Di sini cukup banyak diurai kepribadian baik Utsman sebagai salah satu sahabat terkemuka dan menantu Nabi sawi yang dijamin masuk surga oleh Nabi saw.

²⁴Seperti dinyatakannya sendiri dalam sebuah pidatonya untuk menanggapi berbagai tuduhan negatif tersebut. J. Soe'yb, *Sejarah Daulat*, 438.

²⁵*Ibid.*, 438.

²⁶*Ibid.*, 439.

Memang tidak menutup kemungkinan telah terjadi penyalahgunaan kekayaan negara oleh keluarga Utsman yang memiliki jabatan jika melihat pola hidupnya, seperti juga kemungkinan gaya hidup itu karena kekayaan pribadinya. Inilah yang disebut sebagai informasi yang dipersepsi sehingga membentuk opini. Yang jelas belum ditemukan bukti nyata, kecuali Utsman yang jelas tidak memiliki apa-apa pada akhir masa jabatannya, bahkan kekayaannya yang melimpah justru habis sama sekali karena disumbangkan untuk perjuangan Islam.

Mencermati Ranah Lain

Ketika semua tuduhan tidak cukup kuat untuk menjadi faktor utama penyebab munculnya gerakan oposisi, keharusan untuk mencari faktor-faktor lain untuk menyingkap misteri ini. Berdasar kesimpulan dari data-data yang tersedia dalam berbagai literatur sejarah, gerakan itu hakikatnya lebih pertama kali disebabkan oleh rasa iri karena kebijakan ekonomi yang dirasa tidak menguntungkan sementara pihak. Hal itu dapat terlihat dari kondisi lebih luas masyarakat Islam.

Setidaknya itu terlihat sejak kebijakan menjadikan Syam sebagai wilayah tertutup untuk umum sejak ditaklukkan pada masa Umar, dan tidak menjadikan seluruh tanah sebagai milik negara, melainkan tetap menjadi milik penduduk yang tetap tinggal dalam kekuasaan Islam dan mengelolanya seperti biasa. Hal itu disebabkan oleh kondisi wilayah tersebut yang belum begitu aman dari ancaman Byzantium yang belum lumpuh total. Sehingga untuk menghindari penyusupan, ia tertutup untuk umum. Selain itu, masyarakatnya telah terbiasa bercocok tanam—dalam areal yang tidak terlalu luas jika dibandingkan dengan Iraq—karena berasal dari imigran Suku Himyar (Arab Selatan) sejak jebolnya bendungan Ma'rib. Karena itu tidak mungkin menjadi feodalisme dengan kepemilikan tanah pada segelintir orang. Rakyat Syam justru lebih senang dengan hanya diwajibkan membayar *kharaj* (pajak bumi bagi non-muslim) dan *jizyah* (pajak atas jaminan keamanan) dari pada berada di bawah kekuasaan Romawi.²⁷ Mereka menjadi tenteram dan karena itu pula mereka tidak mempersoalkan nepotisme sekalipun yang menjadi Gubernur adalah Mu'awiyah. Hal ini paralel dengan anggapan umum bahwa kesejahteraan ekonomi sangat menentukan kondisi politik. Di masa modern sekalipun hal itu masih terlihat di beberapa negara.

²⁷M.A. Shaban, *Islamic History*, 74. Lihat juga N. Shiddiqy, *Menguak Sejarah*, 69.

Sedang kebijakan untuk daerah Iraq, khususnya wilayah Kufah, justeru sebaliknya. Setelah ditaklukkan, seluruh tanah yang begitu luas dijadikan milik negara. Itu berdasarkan pertimbangan untuk menghindari feodalisme dengan lahirnya tuan-tuan tanah yang memiliki tanah begitu luas dengan mempekerjakan orang. Karena penduduk Iraq adalah imigran dari Mudlar (Arab Utara) yang melakukan imigrasi besar-besaran setelah melihat kesuburan wilayah baru. Sementara mereka adalah suku yang masih berpola hidup nomad. Kepemilikan tanah mereka dibatasi dan diatur oleh negara sejak masa Umar. Pada masa Utsman ditambah dengan kebijakan penukaran tanah bagi orang luar Iraq dengan tanah Iraq jika ingin pindah ke sana karena lebih subur. Hal itu misalnya dilakukan bagi para veteran untuk menghargai jasa besar mereka selama ini. Kebijakan semacam ini jelas mengurangi kekayaan penduduk Iraq sehingga membuat mereka kecewa dan dendam serta terus melakukan rongrongan baik terhadap gubernur atau akhirnya pada khalifah sendiri.²⁸ Apalagi yang diuntungkan adalah penduduk Syam yang dihuni oleh suku Arab Selatan yang *notabene* bekas musuh mereka, dan mereka (Arab Utara) merasa lebih berjasa dalam berbagai penaklukan, karena mayoritas tentara adalah Arab Utara yang nomad itu.

Di kawasan Mesir, persoalan kebijakan ekonomi yang melahirkan gerakan oposisi adalah perhatian yang lebih besar serta pemberian hadiah dan gaji yang lebih tinggi kepada tentara muda yang masih energik untuk memberikan motivasi lebih besar dalam penaklukan wilayah baru. Ancaman Byzantium tetap merupakan bahaya laten dan tantangan pengamanan wilayah juga semakin berat dengan semakin luasnya wilayah. Apalagi tunjangan terhadap para pensiunan pejuang dikurangi untuk kepentingan memperkuat militer. Ini membuat kaum veteran protes karena mereka telah berjasa besar atas wilayah yang luas itu. Mereka menuntut penghargaan jasa, setidaknya perlakuan sama dengan tentara muda. Karena aspirasinya tidak tertampung, muncullah gerakan oposisi menentang pemerintah.²⁹

Keresahan, kebencian dan gejolak di berbagai daerah (Bashrah, Kufah dan Mesir) juga tidak lepas dari provokasi Abdullah bin Saba', seorang rabi dari Shan'a, Yaman, yang masuk Islam dan kemudian dikenal dengan Abu Sauda'. Setelah mempelajari peta kekuatan Islam ketika di Madinah. Ia mulai melancarkan provokasinya dari kawasan Iraq lalu ke Mesir dengan berbagai propaganda sesuai dengan karakter, situasi dan kecenderungan masyarakatnya

²⁸N. Shiddiqy, *Menguak Sejarah*, 70-1.

²⁹M.A. Shaban, *Islamic History*, 66-7.

masing-masing.³⁰ Sejak itulah gerakan oposisi terganisir dan terjalin kontak antar daerah kemudian berangkat ke Madinah bersama untuk menuntut Utsman meletakkan jabatannya.

Kebijakan-kebijakan itulah yang menjadi faktor awal munculnya ketidak-sukaan pada pemerintah Utsman. Bahkan kecemburuan sosial itu telah ada benih-benihnya sejak masa Umar akibat kebijakan ekonominya. Wellhausen menyatakan bahwa kebijakan Utsman hanya melanjutkan yang telah ditetapkan oleh Umar untuk tidak membagi *fay'* pada *al-sawad* di Iraq. Ketidak-sukaan muncul dan meledak pada masa Utsman yang berkarakter lebih *soft* dibanding Umar. Bahkan Caetani lebih jauh mengatakan bahwa Utsman adalah “korban” kebijakan Umar yang keliru.³¹ Kecemburuan itu berakumulasi dengan berbagai kasus sekunder dan mem-*blow-up* hal yang mereka anggap keliru seperti nepotisme karena pengangkatan keluarga, korupsi karena kemewahan gaya hidup mereka dan lainnya. Bahkan beberapa sejarawan menyatakan bahwa mereka memang sengaja mencari kesalahan para gubernur untuk menjatuhkannya sebagai sasaran antara. Ini dapat dipahami kasus Walid di Kufah dengan tuduhan mabuk melalui pengaduan berstempel resmi yang dicuri saat Walid tertidur kelelahan setelah para oposan bertamu dengan sopan sampai larut malam. Rekayasa itu merupakan upaya balas dendam setelah tiga orang anak dari Bani Asad yang dihukum mati (*qishash*) karena membunuh. Upaya balas dendam itu ternyata memang dilakukan oleh orang tua mereka. Ketiga anak itu bernama Zuhair bin Jundab, Muwarrak bin Abi Muwarrak, Syubail bin Ubay. Atas fatwa Utsman mereka diqishash. Rupayanya suku mereka, terutama orang tua mereka, Jundab al-Asadi, Muwarrak al-Asadi, Abu Zainab al-Asadi, yang telah lama memendam kekecewaan mendapat tambahan luka baru. Sementara sebenarnya tidak ada saksi mata yang melihat langsung Walid Mabuk, kecuali mencium bau arak dari mulutnya dan mereka melihat ada orang keluar dari rumah Walid dalam keadaan mabuk.³²

Pada saat itu kondisi pemerintahan memang cukup kondusif untuk munculnya gerakan oposisi. Itu disebabkan oleh karakter Utsman sendiri yang lembut dan cenderung longgar dalam kontrol terhadap rakyat dan bawahannya. Selain karena watak pribadinya yang lembut dan santun, juga terkait dengan usianya yang telah lanjut untuk ukuran kepala negara (terpilih pada usia 70 tahun dan wafat pada usia 82 tahun). Seperti dikatakan S. Ameer Ali: *Osman, though virtous and honest, ware very old and feeble in character, and quiet unequal to the task of*

³⁰M. al-Khudlari Beik, *Muhadllarat*, hlm. 34-5 dan 45. Bahkan J. Soe'yb membahas sepak terjang Abdullah bin Saba' dalam bab khusus. Lihat J. Soe'yb, *Menguak Sejarah*, 408-413.

³¹W. Madelung, *The Succession*, 85.

³²M. Khudlari Beik, *Muhadllarat Tarikh*, 33.

*government. He feel at once, as they had anticipated, under influence of his family. He was guided entirely by his secretary, Merwan.*³³ Apalagi pada paruh terakhir kekhalifahannya, banyak sejarawan menilai bahwa pemerintahan sebenarnya dikendalikan oleh Marwan yang memiliki *vested interest*. Bahkan kemunculan gerakan oposisi mendapat ruang masuk dari berbagai kesalahan para bawahan dan keluarganya.

Fenomena *Post-Truth* dalam Gerakan Anarkis

Ulasan di atas memperlihatkan beberapa aspek fenomena *Post-Truth* sehingga puncaknya melahirkan anarkisme politik paling awal dalam sejarah Islam. Aspek-aspek bisa dilacak dengan mengungkap dimensi-dimensi yang tidak sepenuhnya tampak ke permukaan. *Pertama*, pengabaian terhadap fakta dan berpedoman kepada fiksi, opini, subjektivitas dan hoaks.³⁴ Yang dimaksud hoaks di sini bukan semata sesuatu yang tidak nyata terjadi, tapi bisa jadi sesuatu yang terjadi tapi dibentuk dan direayasa sehingga peristiwa tersebut dipahami secara berbeda.³⁵ Fakta yang ada diabaikan demi opini yang memang diinginkan oleh oposisi. Hal itu bisa dilihat pada tuduhan nepotis kepada Utsman, karena mengangkat anggota keluarganya dalam berbagai jabatan strategis. Tapi opini ini mengabaikan fakta bahwa beberapa gubernur yang diangkat telah diganti lagi dengan orang lain yang bukan anggota keluarga sesuatu dengan tuntutan oposisi. Sa'id Ash diganti Abu Musa al-Asyari sebagai Gubernur Kufah sebagai contoh.³⁶ Tapi di masa sebelumnya, ketika Abu Musa al-Asy'ari diganti Abdullah bin Amir sebagai Gubernur Basrah tidak ada penolakan walaupun beraroma nepotis

Tuduhan nepotis itu menguat ketika Utsman dinilai terlalu melindungi keluarganya yang dianggap bersalah oleh oposisi. Opini ini dimainkan untuk menguatkan tuduhan nepotis dan selanjutnya membakar emosi massa. Kelompok oposisi mengabaikan fakta bahwa Utsman menghukum pejabat sekalipun anggota keluarganya sendiri yang divonis bersalah. Walid yang dihukum di muka umum setelah divonis bersalah karena mabuk dan dipecat secara tidak

³³S. Ameer Ali, *A Short History*, 46.

³⁴John Christianto Simon, "Pendidikan Kristiani di Era Post-Truth:," 101

³⁵Jonatan Dwiputra, "Hoax Dan Kekerasan: Sebuah Refleksi Terhadap Kejadian 39:1-23 Serta Upaya Mencegah Hoax Dan Kekerasan Di Era Post-Truth," *SCRIPTA : Jurnal Teologi dan Pelayanan Kontekstual*, Volume 11, Nomor 1, (Mei, 2021): 45.

³⁶Muhammad Khudari Bek, *Muhadllarat Tarikh*, I: 33-4

hormat dan selanjutnya digantikan oleh Sa'id bin Ash.³⁷ Fakta ini berikutan fakta lain diabaikan untuk tetap melanggengkan opini nepotis pada Utsman.

Pengabaian terhadap fakta yang bertentangan dengan opini yang disebarluaskan juga dapat dilihat pada tuduhan korupsi pada Utsman. Tuduhan tersebut berdasar peristiwa penjualan *ghanimah* yang begitu besar kepada Marwan keluarganya sendiri) dari penaklukan wilayah Afrika Utara. Beredar kabar hasil penjualan tersebut jauh dari kalkulasi semestinya jika melihat pada melimpahnya *ghanimah* yang didapatkan. Fakta yang diabaikan adalah bahwa yang dijual hanya barang-barang yang sulit dibawa ke Madinah atau butuh biaya besar saja yang dijual di tempat, sementara barang-barang yang mudah dibawa seperti emas dan perak dibawa ke Madinah untuk kas negara. Karena itu, penpatannya dari hasil penjualan tidak sebesar jumlah seluruh *ghanimah*, karena yang dijual hanya sebagian, bukan keseluruhan.

Lebih jauh, tuduhan korupsi juga dihembuskan kelompok oposisi karena mengetahui Utsman memberikan sumbangan kepada anggota keluarganya dalam jumlah besar saat acara perkawinan dan lainnya. Mereka membangun opini bahwa Utsman menggunakan kekayaan negara untuk kepentingan keluarganya. Fakta yang diabaikan adalah bahwa Utsman memberikan sumbangan itu dari kekayaan pribadinya, tidak ada hubungannya dengan kekayaan negara dan jabatan yang disandangnya.³⁸

Kedua, menafikan realitas secara lebih luas dengan berpedoman kepada fiksi dan argument berbasis fakta. Ini tampak dalam tuduhan nepotis yang menyebabkan kelompok oposisi bertindak salah dan menjadi dasar mereka bergerak dari Kufah, Basrah dan Mesir. Tapi justru di Syam sendiri tidak penolakan dan gerakan oposisi padahal gubernurnya dala Mu'awiyah yang juga keluarga Utsman.³⁹ Rakyat tidak menganggap pengangkatan Mu'awiyah sebagai nepotisme dan salah. Begitu juga ketika Abu Musa diganti Abdullah bin Amir tidak muncul penolakan dengan alasan nepotis di Basrah pada masa sebelumnya.⁴⁰

Pengangkatan anggota keluarga sebagai pejabat strategis juga mengabaikan fakta bahwa pada masa itu dan umumnya tradisi monarkhi, pengangkatan itu adalah sesuatu yang lumrah dan tidak dianggap sebagai kesalahan. Para rezim monarkis biasa mengangkat anggota keluarganya sebagai pengganti dan sebagai penjabat-pejabat tinggi. Secara moral pada masa itu masih dapat diterima. Itu dilakukan dengan jaminan loyalitas para penerus, bawahan dan

³⁷Ibid., 33.

³⁸J. Soe'yb, *Sejarah Daulat*, 439.

³⁹Muhammad Khudari Bek, *Muhadlarat Tarikh*, I: 33-4.

⁴⁰J. Soe'yb, *Sejarah Daulat*, 425.

mitra kerja. Dalam negara dengan situasi perang dan penaklukan yang terus mengancam, loyalitas adalah pertimbangan paling atas untuk menunjuk seseorang menduduki jabatan strategis. Apalagi daerah yang akan dipasrahkan adalah bekas penaklukan yang sangat membuka kemungkinan kudeta. Tidak mungkin pejabat yang berkuasa di daerah itu dipasrahkan kepada orang yang tidak terjamin loyalitasnya. Dalam budaya Arab sebagai masyarakat dengan tradisi kesukuan, yang paling terjamin loyalitasnya adalah anggota keluarga.⁴¹ Argument berbasis fakta seperti ini dinafikan begitu saja demi memainkan emosi massa dengan menggaungkan tuduhan nepotis.

Sikap menafikan realitas dan argument berbasis fakta juga terlihat pada kenyataan bahwa para gubernur yang diangkat Utsman adalah orang-orang yang secara karir memenuhi syarat. Antara lain mereka adalah para panglima dengan keahlian militer yang mumpuni. Mereka yang diangkat sebagai gubernur adalah para panglima yang telah berjasa memimpin pasukan dalam penaklukan wilayah baru. Kriteria ini adalah kriteria para gubernur dari seluruh gubernur yang ada dan yang diangkat Utsman kenyataannya adalah orang dengan kriteria di atas. Tapi fakta dan argument ini tidak menjadi landasan gugatan kelompok oposisi. Mereka hanya fokus pada kapasitas mereka sebagai anggota keluarga Utsman, tak peduli dengan prestasi, kemampuan, dan kapabilitas nyata yang telah mereka tunjukkan.

Ketiga, lenyapnya moralitas publik karena segenap perilaku yang kemudian membentuk gerakan massa dikendalikan oleh kebencian dan intoleransi. Berbagai tuduhan negatif yang disebarkan menyuburkan kebencian kepada Utsman di kelompok masyarakat yang terprovokasi hingga melunturkan moralitas publik. Nilai-nilai Isla tak lagi menjadi rujukan. Nilai-nilai tabayun terhadap informasi, penghormatan kepada pimpinan, kepada tokoh yang dimuliakan Nabi, bahkan menantu Nabi sendiri. Nilai prasangka baik dan menjauhi prasangka jelek, tuduhan palsu, fitnah dan semacannya tak lagi diindahkan. Semua seolah hilang tak berbekas. Semuanya hanya didorong oleh kebencian yang lain dari opini yang dibentuk dengan mengabaikan kebenaran faktual, menafikan fakta dan argument berbasis fakta. Persepsi dan opini pribadi yang subjektif berperan sebagai kebenaran dan menjadi rujukan berindak.

Pada akhirnya, kebencian itu memuncak pada tindakan anarkis, sadis menghalalkan pembunuhan sang khalifah, seorang muslim membunuh pemimpin orang muslim sendiri, pembunuhan rakyat muslim kepada pemimpin muslim sendiri, seorang yang secara teologis telah dijamin kebaikan oleh Nabi sendiri karena telah mendapat jaminan masuk surga, seorang

⁴¹N. Shiddiqy, *Menguak Sejarah*, 68.

dengan budi yang tinggi dengan pengorbanan untuk Islam yang tiada tara. Semua itu menguap dan berganti kebencian, intoleransi, kekacauan dan kekerasan. Benar kata Stuart Sim bahwa *Post-Truth* bukan semata skeptisisme, relativisme kebenaran atau penolakan terhadap kebenaran, tapi adanya kekuatan untuk menggiring opini dan menggerakkan massa untuk kepentingan tertentu.⁴² Terutama dalam persoalan politik, kekerasan adalah sesuatu yang sangat mudah terjadi dengan dorongan kekuatan tersebut.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa anarkisme politik di masa awal Islam dalam peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan memperlihatkan aspek-aspek fenomena *Post-Truth* yang menjadi kecenderungan peradaban saat ini. Aspek-aspek tersebut terlihat dalam rangkaian peristiwa dan dimensi-dimensi historisnya. *Pertama*, pengabaian terhadap fakta dan hanya merujuk pada persepsi dan fiksi. Hal itu dapat dilihat pada tuduhan nepotis dan korupsi terhadap Utsman yang ternyata tidak sesuai faktanya. *Kedua*, penafian terhadap realitas dan argument berbasis fakta. Hal ini dapat dilihat pada realitas historis yang tak mempersoalkan pengangkatan anggota keluarga dengan alasan jaminan loyalitas dan tradisi kesukuan dan konteks sejarah dengan tradisi monarkis. Hal itu juga tampak pada realitas bahwa Utsman telah mengikuti apa yang mereka inginkan dengan menggati gubernur, menghukum anggota keluarga demi meredam konflik. Realitas kejujuran dan tidak adanya korupsi juga dinafikan dengan hanya berpedoman pada persepsi, prasangka dan pembentukan opini. *Ketiga*, persepsi dan opini yang terus disebarkan melahirkan kebencian dan prasangka negative yang kemudia melenyapkan moralitas publik sehingga menimbulkan kekacauan dan kekerasan. Ujungnya adalah pembunuhan sadis kepada khalifah Utsman yang sedang membaca Alquran. Persepsi, opini dan subjektivitas menjadi rujukan dengan mengabaikan kebenaran, fakta, relates dan argument objektif adalah kecenderungan *Post-Truth* di masa kini yang dapat menimbulk hilangnya moralitas publik yang kemudian melahirkan kekacauan, intoleransi dan kekerasan. *Post-Truth* yang bertumpu pada hoaks sangat rentan bagi munculnya kekerasan sehingga menjadi sangat berbahaya bagi kehidupan berperadaban, terutama ketika masuk ke ranah politik.

⁴² Stuart Sim, *Post-truth, Scepticism, and Power* (Hampshire: Palgrave MacMillan, 2019), 2.

Daftar Pustaka

- Adzfar, Zainul dan Badrul Munir Chair. "Kebenaran di Era Post-Truth dan Dampaknya bagi Keilmuan Akidah." *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*. Volume 9, Nomor 2, 2021.
- Asghar Ali Engineer. *The Origin and Development of Islam*. New Delhi: Orient Logman, 1980.
- Atsir, Ibn al-. *Al-Kamil fi al-Tarikh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1965.
- Dwiputra, Jonatan. "Hoax Dan Kekerasan: Sebuah Refleksi Terhadap Kejadian 39:1-23 Serta Upaya Mencegah Hoax Dan Kekerasan Di Era Post-Truth," *SCRIPTA : Jurnal Teologi dan Pelayanan Kontekstual*, Volume 11, Nomor 1, (Mei, 2021).
- Hasan, Hasan Ibrahim. *Tarikh al-Islam*. Kairo: Maktabah al-Nahdliyyah al-Mishriyyah, 1964.
- Khudari Bek, Muhammad. *Muhadlarat Tarikh al-Umam al-Islamiyyah*. Kairo: Maktabah Tijariyyah al-Kubra, 1969.
- Madelung, Wilfred. *The Succession to Muhammad*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Mahmudannasir, Syed. *Islam, Its Concept and History*. (New Delhi: Kitab Bhavan, 1994).
- Shiddiqy, Nourouzzaman. *Menguak Sejarah Muslim: Suatu Kritik Metodologis*. Yogyakarta: PLPM, 1984.
- Sim, S. *Post-truth, Scepticism, and Power*. Hampshire: Palgrave MacMillan, 2019.
- Simon, John Christianto. "Pendidikan Kristiani di Era Post-Truth: Sebuah Perenungan Hermeneutis Paul Ricoeur," *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 5, no. 1 (September 30, 2020): 101.
- Soe'yb, Joesoeb. *Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Suharyanto, Cosmas Eko. "Analisis Berita Hoaks di Era Post-Truth: Sebuah Review," *Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi* 10, no. 2 (Desember 2019): 38.
- Suyuthi, Jalaluddin al-. *Itmam al-Dirayah li Qurra' al-Nuqayah*. Kairo: Kasyidah, 2019.
- Thabary, Ibn Jarir al-. *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*. Beirut: Dar al-Fikr, 1979.
- Tim Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.